

**IMPLEMENTASI PROGRAM
SERTIFIKAT KAMPUNG TUA DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Laura Kristiyani Napitupulu
181010007**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**IMPLEMENTASI PROGRAM
SERTIFIKAT KAMPUNG TUA DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana



Oleh:
Laura Kristiyani Napitupulu
181010007

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Laura Kristiyani Napitupulu

NPM : 181010007

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKAT KAMPUNG TUA DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar sarjana yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 1 Agustus 2022



Laura Kristiyani Napitupulu

181010007

**IMPLEMENTASI PROGRAM
SERTIFIKAT KAMPUNG TUA DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Laura Kristiyani Napitupulu
181010007**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 01 Agustus 2022



**Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP.
Pembimbing**



ABSTRAK

Pemerintah Kota Batam telah meresmikan sebanyak 37 Kampung Tua Di Kota Batam dan sebanyak 7 Kampung tua sudah diberikan Sertifikat. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) diseluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah Kampung Tua di Kota Batam, melalui program PTSL akan mempermudah percepatan pemberian sertifikat sebagai kepastian hukum terhadap masyarakat Kampung Tua. Beberapa persoalan status lahan yang dihadapi oleh Tim program PTSL dikawasan Kampung Tua di Kota Batam, yakni status lahan HPL, kawasan Bandara, titik-titik PL di wilayah kampung tua, adanya kontribusi permasalahan yang datangnya dari persoalan penataan dan perlindungan kawasan hutan lindung. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program sertifikasi kampung tua di Kota Batam dengan menggunakan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan fokus pada hasil wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan implementasi program sertifikat Kampung Tua di Kota Batam sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal karena masih adanya kekurangan dari sumberdaya manusia dari pihak pelaksana PTSL yaitu panitia sistem dan jaringan dan petugas ukur pada program PTSL. bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sehingga pelaksanaannya belum optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikat, PTSL

ABSTRACT

The Batam City Government has inaugurated as many as 37 Old Villages in Batam City and as many as 7 Old Villages have been given certificates. Based on Presidential Instruction No. 2 of 2018 concerning Acceleration of Complete Systematic Registration (PTSL) throughout Indonesia, especially the Kampung Tua area in Batam City, through the PTSL program will facilitate the acceleration of certificate issuance as legal certainty for the old village community. Some of the land status problems faced by the PTSL program team in the old village area in Batam City, namely the status of HPL land, the airport area, PL points in the old village area, the contribution of problems that come from the problem of structuring and protecting protected forest areas. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the old village certification program in Batam City by using indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure that affect the success and failure of an implementation. This study uses a qualitative descriptive research conducted with a focus on the results of interviews and documentation. The results show that the implementation of the old village certificate program in Batam City has been going well, but has not been maximized because there is still a lack of human resources from the PTSL implementer, namely the system and network committee and measuring officers in the PTSL program. that the implementation of the complete systematic land registration program (PTSL) so that its implementation is not optimal.

Keywords: Certificate, Implementation, PTSL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda S.Kom., M.Si sebagai Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora
3. Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam
4. Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam
5. Segenap Dosen dan Staff di Universitas Putera Batam
6. Orang Tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi dan yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis
7. Seluruh anggota dan staf yang ada di kantor BPN Kota Batam
8. Seluruh masyarakat Kampung Tua yang menjadi informan

9. Rekan Mahasiswa/I program studi Administrasi Negara angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat kepada penulis di Universitas Putera Batam
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian proposal ini secara langsung atau tidak.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkat dan kasih karunia Nya, Amin.

Batam, 01 Agustus 2022



Laura Kristiyani Napitupulu

181010007



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kebijakan Publik	9
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik	9
2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik	11
2.1.3 Tahap-tahap Pengambilan Kebijakan Publik	12
2.2 Implementasi Kebijakan	13
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	13
2.2.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan.....	16
2.2.3 Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Publik	17
2.2.4 Model Implementasi Kebijakan.....	18
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.4 Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Jadwal Periode Penelitian	28
3.3 Sumber Data.....	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.5 Metode Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Gambaran umum Badan Pertanahan Nasional Kota Batam.....	34
4.1.2 Program PTSL di Kawasan Kampung Tua di Kota Batam.....	44
4.1.3 Implementasi Program Sertifikat Kampung Tua di Kota Batam.....	50
4.2 Pembahasan.....	72
4.2.1 Implementasi Program Sertifikat Kampung Tua di Kota Batam.....	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Simpulan	81
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88
Lampiran 1 Pendukung Penelitian	88
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	96
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Kampung Tua di Kota Batam.....	4
Tabel 1. 2	Data Kampung Tua Yang Sudah Tersertifikasi.....	5
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1	Jadwal Penelitian	29
Tabel 3. 2	Data Informan.....	31
Tabel 4. 1	Jumlah Pegawai BPN Secara Keseluruhan	41
Tabel 4. 2	Jumlah Petugas Program PTSL	42
Tabel 4. 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	43
Tabel 4. 4	Sumber Daya Manusia program PTSL di Kantor BPN Kota Batam...55	
Tabel 4. 5	Sarana dan Prasarana di Kantor BPN Kota Batam.....	56
Tabel 4. 6	Jenjang Pendidikan Panitia PTSL Tim I	61
Tabel 4. 7	Jenjang Pendidikan Panitia PTSL Tim II.....	62
Tabel 4. 8	Jenjang Pendidikan Panitia PTSL Tim III.....	62
Tabel 4. 9	Tupoksi di Kantor Badan Pertanahan Kota Batam.....	63
Tabel 4. 10	SOP/Juknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	68
Tabel 4. 11	Persyaratan PTSL	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Model Implementasi kebijakan menurut George C Edward III.....	20
Gambar 2. 2	Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Badan Pertanahan Kota Batam	38
Gambar 4. 2	Jenis Kelamin Pegawai Yang Ada di BPN.....	44
Gambar 4. 3	Tahapan Pelaksanaan PTSL.....	45
Gambar 4. 4	Sosialisasi.....	51
Gambar 4. 5	Surat Undangan.....	51
Gambar 4. 6	Loket Pelayanan PTSL	57
Gambar 4. 7	Minibus BPN Kota Batam.....	57
Gambar 4. 8	Alat Ukur	58



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian implementasi dapat dikaitkan dengan suatu aturan atau kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat atau masyarakat umum. Suatu kebijakan apabila telah dipraktekkan itu dianggap bermanfaat. Langkah penting dalam keseluruhan proses pengembangan peraturan atau kebijakan adalah implementasi, salah satu langkah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya untuk pengambilan keputusan adalah pelaksanaan kebijakan publik. Pengembangan kebijakan publik yang komprehensif dalam pengambilan keputusan salah satunya adalah pelaksanaan kebijakan publik.

Salah satu ide untuk membuat data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data persil tanah yang ada adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai Program Strategis Nasional. Tujuannya untuk memastikan bahwa kumpulan data untuk bidang tanah yang terdaftar lengkap dan akurat. Ini akan memastikan bahwa kumpulan data untuk bidang tanah yang terdaftar lengkap dan akurat. percepatan pemetaan bidang tanah merupakan tujuan PTSL. Selain itu, PTSL pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan memperkuat perekonomian negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap yakni proses pertama kalinya semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di desa, kecamatan, atau nama lain

yang setingkat dimasukkan dalam prosedur PTSL, yang dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memberikan jaminan hukum atau hak atas tanah milik masyarakat melalui inisiatif ini. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah mengembangkan sistem PTSL untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. Dasar hukum PTSL adalah yang telah diatur oleh Kementerian ATR/BPN dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan ini telah ditetapkan pada 22 Maret 2018 dan berlaku sejak 11 April 2018 (Kominfo, 2018).

Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam Pasal 1 ayat (2) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan fisik merupakan salah satu tahapan kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi pengumpulan dan penegasan kebenaran data fisik dan hukum mengenai satu atau lebih objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kali secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kecamatan. Kantor Pertanahan dapat melaksanakan pendaftaran tanah yang komprehensif dan sistematis sebagai bagian dari usaha biasa atau sebagai proyek atau kegiatan program tahunan. Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan fisik. Pengumpulan data fisik meliputi: (1) Penetapan batas bidang tanah; (2) Pengukuran batas bidang tanah; (3) Pemetaan bidang tanah; (4) Pengumuman data fisik; (5) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang

berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah (Menteri ATR/Kepala BPN, 2017).

Berdasarkan Instruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) diseluruh wilayah Indonesia akan mempermudah percepatan pemberian sertifikat tanah sebagai kepastian hukum termasuk bagi masyarakat Kampung Tua. Salah satu inisiatif BPN yang didanai oleh Pemko dan BP Batam untuk menghasilkan peta Kota Batam yang komprehensif adalah program PTSL. Program PTSL dimaksudkan pada akhirnya untuk mendaftarkan dan mendokumentasikan secara menyeluruh semua tanah yang ada. Pada kesempatan ini yang dibagikan kepada masyarakat yakni sertifikat tanah dari program Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Wakaf, dan Sertifikat Barang Milik Negara (BMN), antara lain Hak Milik, Hak Pakai, dan Hak Guna Bangunan (HGB). Berdasarkan data BPN 2021 terdapat 37 Kampung Tua yang telah ditetapkan di Kota Batam, adapun tabelnya dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Kampung Tua di Kota Batam

No.	Kecamatan	Jumlah Kampung Tua	Jumlah Kampung Tua Bersertifikasi
1.	Kecamatan Batu Ampar	4 Kampung Tua	0
2.	Kecamatan Bengkong	4 Kampung Tua	0
3.	Kecamatan Batam Kota	1 Kampung Tua	0
4.	Kecamatan Lubuk Baja	1 Kampung Tua	0
5.	Kecamatan Sekupang	3 Kampung Tua	1
6.	Kecamatan Nongsa	13 Kampung Tua	2
7.	Kecamatan Sei Beduk	3 Kampung Tua	1
8.	Kecamatan Sagulung	7 Kampung Tua	3
9.	Kecamatan Batu Aji	1 Kampung Tua	0
Total		37 Kampung Tua	7 Kampung Tua

(Sumber: Badan Pertanahan Kota Batam, 2022)

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Kampung Tua merupakan salah satu kawasan cagar budaya di Kota Batam yang ditetapkan berdasarkan peraturan Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014, bahwa Kampung Tua atau Perkampungan Tua merupakan salah satu Kawasan Cagar Budaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 Rangka Pelestarian Kampung Tua adalah kumpulan rumah yang dijadikan sebagai tempat berteduh bagi penduduk pertama Kota Batam sebelum tahun 1970 ketika Batam mulai dibangun yang mengandung nilai-nilai sejarah, budaya lokal, dan religi yang harus dilestarikan. Pemerintah Kota Batam memutuskan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan di Kampung Tua, bertujuan untuk

mempertahankan cagar budaya bernuansa Melayu di Kampung Tua dan melindungi seluruh hak masyarakat Melayu Kota Batam. SK Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Kawasan perkampungan tua di Kota Batam telah dicabut dari tindakan tersebut. Pemerintah Kota Batam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 105/HK/IV/2004 untuk Walikota Batam tentang Penetapan Kawasan Perkampungan Tua di Kota Batam Tahun 2004 (Utami, 2020).

Setelah telah ditetapkan 37 Kampung Tua yang ada di Kota Batam terdapat 30 Kampung Tua yang belum mendapatkan sertifikat sebagai bentuk kepastian hukum serta 7 Kampung Tua yang sudah memiliki sertifikat. Kampung Tua di Kota Batam yang sudah diberikan sertifikat adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Kampung Tua Yang Sudah Tersertifikasi

No.	Kecamatan	Jumlah	Kampung Tua Yang Sudah Bersertifikasi
1.	Nongsa	2	Kampung Tua Telaga Punggur
			Kampung Tua Nongsa Pantai
2.	Sagulung	3	Kampung Tua Sei Binti
			Kampung Tua Tanjung Gundap
			Kampung Tua Tiangwangkang
3.	Sei Beduk	1	Kampung Tua Tanjung Piayu Laut
4.	Sekupang	1	Kampung Tua Tanjung Riau

(Sumber: Badan Pertanahan Kota Batam, 2022)

Banyak tanah di lingkungan Kampung Tua Batam masih memiliki Hak Pengelolaan (HPL) yang diberikan oleh pemerintah Batam. Padahal, warga Kampung Tua sudah lama menghuni wilayah tersebut, bahkan sebelum adanya pemerintahan di Kota Batam. Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua di Kota

Batam sejauh ini menangani berbagai persoalan status tanah, antara lain status tanah HPL, kawasan bandara, hutan lindung dan masalah lain yang muncul di lapangan, seperti titik PL di tanah lama. Masalah yang timbul karena kontribusi yang dihasilkan dari isu penataan dan perlindungan kawasan hutan lindung. Selain persoalan-persoalan di atas masih banyak peta-peta yang belum selesai dalam hal pemanfaatan dan penatausahaan wilayah-wilayah tanah tertentu yang terlihat di lapangan. Salah satu alasan keterlambatan penyelesaian yang berlarut-larut adalah penetapan peta yang tidak lengkap. Sebaliknya masyarakat Kampung Tua hanya menerima HPL meskipun mereka menuntut hak milik (Dedy Suwadha, 2020).

Adanya program PTSL seharusnya mempermudah masyarakat Kampung Tua untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang telah mereka usahakan sebelum adanya BP Batam karena hubungan tujuan dan realisasi kebijakan dengan hasil tindakan pemerintah. Diharapkan dengan pelaksanaan program PTSL di Kota Batam bersamaan dengan penerbitan sertifikat Kampung Tua, penduduk Kampung Tua akan lebih mudah mengakses layanan dan infrastruktur yang sesuai dan ekonomi mereka juga akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari salah satu penelitian terdahulu dari Herman Madjid dengan judul implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendaftaran tanah belum berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dilihat dari faktor standar dan sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik, terlihat dari masih lamanya waktu dalam pendaftaran tanah sampai menjadi sertifikat tanah lalu dari faktor Sumber Daya belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dari sarana dan prasarana belum memadai serta jumlah

pegawai yang masih kurang di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala serta dari faktor komunikasi, karakteristik, kondisi sosial ekonomi dan politik serta faktor disposisi belum berjalan dengan baik, oleh karena itu hasil penelitian dan analisis peneliti maka disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah belum berjalan dengan baik. Sehingga peneliti tertarik mengangkat permasalahan mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan dalam kegiatan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Batam khususnya di Kampung Tua di Kota Batam, sebagai bahan penyusunan skripsi berdasarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kampung Tua Batam Kota. Peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai persoalan tersebut dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKAT KAMPUNG TUA DI KOTA BATAM”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan dengan maksud agar penelitian lebih terarah dan lugas sehingga mendorong pembahasan penelitian yang menjadi sasaran penelitian secara mendetail, batasan masalah digunakan untuk mencegah penyimpangan dan perluasan topik. Maka dari itu peneliti membatasi masalah penelitian berkaitan dengan “Implementasi Program Kampung Tua di Kota Batam” dengan ruang lingkup dari 37 Kampung Tua di Kota Batam, penulis mengambil Kampung Tua di kecamatan yang paling banyak Kampung tuanya adalah kecamatan Nongsa yaitu Kampung Tua Terih dan Kampung Tua Melayu Nongsa.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi program sertifikasi kampung tua di Kota Batam?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program sertifikasi kampung tua di Kota Batam.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat secara teoritis, manfaat penelitian ini sebagai pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya kebijakan Publik.
- 2) Manfaat secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi BPN dalam implementasi sertifikat Kampung Tua di Kota Batam, serta menjadi informasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kampung Tua Kota Batam.



Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah cara pemerintah untuk melakukan investasi yang signifikan untuk kepentingan masyarakat, memungkinkan mereka untuk hidup dan berpartisipasi dalam politik. Definisi yang berbeda dari kebijakan publik disediakan oleh Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2012:119) adalah suatu program yang diproyeksikan dengan berbagai tujuan, nilai, dan praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practice*).

Sementara Hogwood & Gunn (Hayat, 2018:14) berpendapat bahwa kebijakan publik itu terdiri dari 9 definisi yaitu:

- 1) Kebijakan menjadi suatu tanda bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*as a label for a field activity*). Merek atau label kebijakan menjadi program terstruktur dan berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam kebijakan.
- 2) Kebijakan didefinisikan sebagai pernyataan yang mendefinisikan tujuan yang luas atau persyaratan tertentu (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*). Keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum atau masyarakat untuk mengatasi masalah yang akan menguntungkan masyarakat atau memecahkan masalah.
- 3) Kebijakan menjadi beberapa usulan khusus (*as specific proposals*). Saran khusus yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik yang datang dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas.

- 4) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*as decision of government*). Apapun langkah yang diambil pemerintah dalam membuat penilaian adalah kebijakan publik. Serupa dengan bagaimana keputusan pemerintah untuk diam adalah bentuk kebijakan publik.
- 5) Kebijakan sebagai bentuk metode verifikasi formal (*as formal authorization*). Kebijakan yang bersifat pengesahan resmi sama dengan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan berkedok peraturan perundang-undangan.
- 6) Kebijakan sebagai program (*as programme*). Program pemerintah termasuk dalam kebijakan publik, setiap inisiatif pemerintah baik resmi maupun tidak resmi dapat dikategorikan sebagai kebijakan..
- 7) Kebijakan sebagai hasil akhir (*as outcome*). Begitu juga dengan hasil kebijakan yang merupakan hasil akhir dari program kerja yang telah dilaksanakan. Kebijakan tersebut mencakup hasil akhir dari program atau pekerjaan pemerintah.
- 8) Kebijakan sebagai salah satu teori ataupun model (*as a theory or model*). Kajian dan analisis terhadap berbagai isu pemerintahan menghasilkan berbagai keluaran atau outcome yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memandu kebijakannya.
- 9) Kebijakan sebagai suatu proses (*as process*). Sebuah prosedur menghasilkan hubungan kebijakan satu sama lain, suatu keputusan atau kebijakan dihasilkan melalui proses kebijakan publik yang berlangsung terus menerus.

Birokrasi pemerintah menjalankan kebijakan publik, tiga jenis kebijakan publik meliputi tahapan perumusan masalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan publik dan evaluasi kebijakan. Tujuan dari kebijakan yang telah dikembangkan bersifat spesifik. Dalam konteks ini diterima bahwa jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka akan gagal (Muadi, MH, & Sofwani, 2016). Sebagai hasil dari kebijakan publik, legislasi merupakan barang publik dan komoditas politik yang mempengaruhi perhatian publik. Di sisi lain, dinamika yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan publik ditingkatkan. Oleh karena itu, menurut satu sudut pandang kebijakan publik harus responsif, fleksibel dan terukur terhadap dinamika pembangunan yang berubah (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (Abdal, 2015: 46-47) karakteristik unik dari kebijakan publik berasal dari fakta bahwa ia dibuat oleh pemerintah. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- 1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mencapai tujuan daripada menjadi perilaku atau tindakan yang terjadi secara tidak sengaja. Kebijakan publik dalam sistem politik saat ini mengacu pada tindakan yang telah direncanakan.
- 2) Pejabat pemerintah menerapkan kebijakan yang pada dasarnya adalah penilaian otonom yang terdiri dari tindakan yang saling berhubungan dan berpola yang mengarah dalam memenuhi suatu tujuan. Kebijakan juga harus memuat pertimbangan-pertimbangan tentang implementasi dan penegakannya karena tidak cukup hanya memutuskan membuat peraturan.
- 3) Kebijakan pemerintah adalah keputusan yang dibuat berdasarkan apa yang

benar-benar dicapai oleh pemerintah dibidang tertentu.

- 4) Setiap keadaan tertentu di mana keterlibatan pemerintah diperlukan, kebijakan publik mungkin melibatkan keputusan oleh otoritas pemerintah untuk ikut campur tangan atau tidak bertindak (Abdal, 2015:46).

2.1.3 Tahap-tahap Pengambilan Kebijakan Publik

Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan dalam tahapan proses kebijakan publik atau pemerintah. Sebelum melangkah ke langkah pengembangan kebijakan, dilakukan pada tahap agenda setting. Saat membuat kebijakan penting untuk mempertimbangkan proses ini agar kebijakan tersebut tidak jatuh atau berubah menjadi omong kosong, apalagi jika membuat kebijakan tersebut menimbulkan masalah baru (Alamsyah, 2016:48-50) mengemukakan bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Perumusan Masalah

Memahami masalah dapat membantu dalam mengungkapkan asumsi yang mendasari, menemukan penyebab, menguraikan tujuan potensial, menggabungkan hasil pengalaman, dan menciptakan pilihan kebijakan baru. Pemahaman yang kuat dan identifikasi masalah akan membantu persiapan perencanaan kebijakan. Mereka yang terkena dampak masalah, serta individu yang bertanggung jawab lainnya dan pengambil keputusan dengan otoritas yang diperlukan dan merumuskan masalah.

- 2) Agenda Kebijakan

Hanya sedikit yang menarik perhatian politisi karena ada begitu banyak masalah umum, pilihan dan preferensi perhatian pembuat kebijakan membentuk

agenda kebijakan. Setiap topik bersaing dengan topik lain yang pada akhirnya menjadi agenda kebijakan dan berpotensi untuk dimasukkan.

3) Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah

Langkah selanjutnya adalah menemukan solusi setelah masalah publik didefinisikan secara tepat dan diputuskan untuk menjadi agenda kebijakan. Merumuskan rekomendasi kebijakan adalah proses mengumpulkan dan membuat serangkaian langkah yang diperlukan untuk mengatasi suatu masalah (Proposal Kebijakan). Dalam hal ini pemain yang berkepentingan dengan hasil berkompromi dan bernegosiasi untuk mencapai kesimpulan kebijakan.

4) Tahap Penetapan Kebijakan

Langkah terakhir bagi pembuat kebijakan adalah menyusun kebijakan yang memiliki akibat hukum setelah salah satu pilihan kebijakan diputuskan untuk digunakan untuk mengimplementasikan usulan tersebut. Proses pembentukan atau pengesahan kebijakan harus terkait erat dengan proses pembuatan kebijakan. Saling menyesuaikan dan menerima standar dan prinsip yang diakui adalah bagian dari proses persetujuan kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (Abdullah, 2016:57) Implementasi kebijakan merupakan suatu proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan praktis melalui jalur birokrasi. Isu-isu lain seperti konflik, pengambilan keputusan, dan proses memperoleh kebijakan semuanya relevan. Implementasi adalah proses memantau bagaimana kebijakan dijalankan setiap hari untuk memastikan pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Apakah semua rencana telah dijalankan sesuai dengan

prosedur? Apa yang telah dicapai atau disumbangkan kepada masyarakat luas? Apakah ada teknik yang lebih efisien untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas?

Dalam gagasan upaya penilaian yang disebut sebagai implementasi kebijakan oleh (Mazmanian dan Sabatier, 2013) disebut tindakan yang diambil untuk menjamin bahwa suatu kebijakan mencapai tujuannya. Definisi mendasar dari implementasi diberikan oleh Lane yang mengklaim bahwa itu dapat dibagi menjadi dua bagian implementasi adalah persamaan fungsional dari maksud, keluaran dan hasil. Menurut uraian tersebut, rumusan pelaksanaan adalah suatu proses yang meliputi maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil sebagai akibat. Persamaan implementasi juga memperhitungkan waktu kebijakan, formator, implementor, dan inisiator. Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12) Implementasi adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh keputusan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengoperasionalkan keputusan dan mengimplementasikan setiap perubahan besar atau kecil yang telah disepakati sebelumnya. Mengetahui apa yang harus terjadi setelah perangkat lunak diinstal adalah tujuan implementasi. Implementasi dalam konteks ini mengacu pada proses menempatkan keputusan mendasar ke dalam tindakan, proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

Pembenaran lain untuk implementasi kebijakan dapat ditemukan dalam pernyataan Grindle dan Quade, yang bertujuan untuk menunjukkan konfigurasi dan saling ketergantungan dari tiga faktor hubungan segitiga antara variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan kebijakan yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Harapan tersebut harus diwujudkan oleh masyarakat agar dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan memilih peraturan perundang-undangan yang sesuai. Selain itu, organisasi pelaksana harus membuat akomodasi untuk kebijakan yang dipilih setelah diidentifikasi karena memiliki kekuatan dan sumberdaya untuk membantu pelaksanaan program atau kebijakan. Sementara itu, situasi dan keadaan lingkungan kebijakan harus dibentuk dengan benar dan memiliki pengaruh positif dan negatif agar dapat berdampak.

Oleh karena itu, persepsi positif terhadap suatu kebijakan di lingkungan akan menghasilkan dukungan positif, yang akan berdampak pada seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan. Konflik sikap akan muncul dan proses implementasi akan terancam, namun jika lingkungan memiliki pandangan negatif. Selain ketiga persyaratan ini, menjaga kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan sebagai akibat langsung dari penerapan kebijakan yang menilai dampak sosialnya juga diperlukan. Untuk memastikan kelompok sasaran kebijakan mematuhi kebijakan, diperlukan implementasi kebijakan. Akibatnya, dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor kunci dalam menentukan seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan.

2.2.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur implementasi kebijakan yakni “(1) unsur pelaksana, (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) kelompok sasaran” adalah faktor yang harus ada untuk pelaksanaan kebijakan. Pihak yang paling bertanggung jawab untuk itu adalah unit administrasi atau unit birokrasi dengan frasa “organisasi pelaksana” yang menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah bertugas menyelenggarakan program-program publik. Menurut (Ripley & Grace A. Franklin, 2019:84) bahwa: *“Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”*, artinya hal ini menunjukkan bahwa divisi birokrasi ini memiliki pegangan yang kuat tentang bagaimana program dan kebijakan diimplementasikan. Mereka memiliki peran utama tetapi tidak menentukan dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan inisiatif (Mirza, 2019:84).

Rencana pelaksanaan dibuat dengan mempertimbangkan tujuan implementasi kebijakan, dan proyek yang ditargetkan kemudian direncanakan dan didanai. Kebijakan atau program dilaksanakan sesuai dengan rencana, artinya baik isi kebijakan maupun lingkungan di mana kebijakan itu diberlakukan berdampak pada bagaimana kebijakan atau program itu akan dijalankan. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan, hasil program berdasarkan tujuan kebijakan diukur. Perubahan dan penerimaan perubahan oleh kelompok sasaran sebagai akibat dari implementasi kebijakan digunakan untuk mengukur pengaruh program terhadap sasaran yang dituju, baik individu maupun kelompok, serta

masyarakat (Akib, 2016:3).

2.2.3 Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Publik

Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan telah terpenuhi dikenal sebagai indikator implementasi kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi, pertimbangan dan pengamatan terhadap tingkat kinerja program suatu unit kerja didasarkan pada indikasi pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, tidak mungkin mengevaluasi kebijakan, program, atau kegiatan secara positif atau negatif tanpa tanda-tanda implementasi kebijakan. Indikator implementasi kebijakan adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif. Selanjutnya akademisi menetapkan indikator implementasi kebijakan menurut Rondinelli dan Cheema (Purwanto dan sulistyastuti, 2012:90) yakni mengidentifikasi 4 faktor implementasi kebijakan, sebagai berikut:

- 1) **Kondisi lingkungan** yaitu terjadinya kegagalan implementasi ketika kebijakan mutu diimplementasikan dalam pengaturan dan lingkungan yang tidak menguntungkan untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini karena implementasi terkait dengan situasi geografis, sosial, dan ekonomi tempat pelaksanaannya.
- 2) **Hubungan antar organisasi** yaitu adanya pendampingan dan kerjasama yang sangat baik antar instansi pemerintah, terutama dalam upaya pelaksanaannya.
- 3) **Sumber daya** yaitu pelaksana membutuhkan sumber daya untuk mendukung implementasi di lapangan dan di dalam organisasi.
- 4) **Karakter Kemampuan Pelaksana** yaitu kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan

kewajiban dan tanggung jawab badan pelaksana.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa proses penilaian implementasi mekanisme evaluasi berkala untuk implementasi kebijakan yang mendorong keberhasilannya diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan membandingkan pelaksanaan kebijakan dengan standar yang ditetapkan atau situasi aktual di lapangan, proses penilaian dilakukan.

2.2.4 Model Implementasi Kebijakan

Meskipun model implementasi kebijakan bersifat abstrak dan praktis, perlu kajian dan penelitian. Kerumitan tantangan kebijakan yang diteliti dan tujuan analisis mempengaruhi nilai model. Artinya teori atau model yang lebih operasional khususnya yang dapat menjelaskan secara akurat hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti diperlukan semakin kompleks dalam masalah kebijakan dan semakin mendalam kajiannya.

Selanjutnya uraian tentang model-model implementasi kebijakan bersumber dari Wahab (Abdullah, 2016:63-70):

- 1) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut *A model of the policy implementation process*.

Kedua pakar kebijakan publik tersebut mempresentasikan teori atau model mereka dengan asumsi bahwa variasi dalam proses implementasi akan tergantung pada sifat kebijakan yang diterapkan. Untuk menghubungkan masalah kebijakan dengan implementasi, idenya adalah untuk membuat model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kerja. Berdasarkan pandangan tersebut, Van Meter & Van Horn membuat tipologi kebijakan berdasarkan:

- a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- b) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

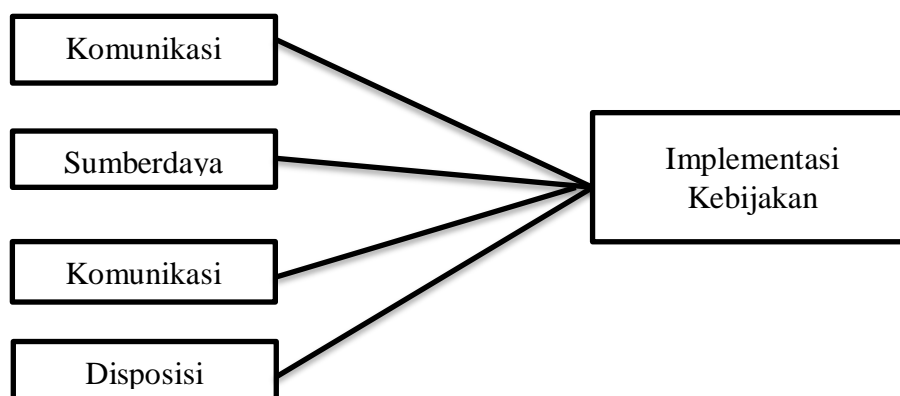
Dikemukakannya bahwa berbagai variabel independen yang saling terkait memisahkan jalan antara kebijakan dan kinerja atau prestasi kerja yakni:

- a) Ukuran dan tujuan kebijakan
 - b) Sumber-sumber kebijakan
 - c) Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
 - d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
 - e) Sikap para pelaksana
 - f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
- 2) Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A Sobatie, disebut *A Framework For Implementation Analysis*

Menurut dua ahli yang disebutkan di atas, sangat penting untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal di seluruh proses implementasi. Variabel ini dapat dibagi ke dalam kategori sebagai berikut:

- a) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
 - b) Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
 - c) Pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.
- 3) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
- Antara perumusan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat

yang dipengaruhinya, implementasi kebijakan merupakan tahapan perumusan kebijakan. Menurut George C Edwards III (Leo, 2016:150-154), Untuk mengevaluasi situasi terbaik dan terburuk, ada empat aspek yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.



Gambar 2. 1 Model Implementasi kebijakan menurut George C Edward III

1) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi menurut George C Edwards III yakni menilai apakah tujuan implementasi kebijakan publik telah berhasil dicapai. Ketika pengambil keputusan siap dan tahu apa yang akan mereka lakukan implementasi menjadi efektif. Setiap keputusan kebijakan yang dihasilkan dari penerapan aturan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia terkait agar pengetahuan yang akan mereka kerjakan menjadi efektif. Agar pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan lebih konsisten dalam mengadopsi setiap kebijakan yang akan diambil di masyarakat diperlukan komunikasi.

Terdapat tiga indikator yang dipakai dalam mengukur variabel komunikasi tersebut yaitu:

a) Transmisi, implementasi yang baik juga dapat dicapai dengan menyalurkan

komunikasi yang baik. Kesalahpahaman sering terjadi akibat tercerai berainya komunikasi (miscommunication). Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, menyebabkan apa yang diharapkan menjadi salah di tengah jalan.

- b) Kejelasan, informasi yang diperoleh para pelaksana kebijakan harus dapat dipahami dan tidak membingungkan. ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi para pelaksana atau implementor membutuhkan keluwesan dalam menjalankan kebijakan. Namun di tingkat lain hal ini sebenarnya akan membelokkan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi, untuk dapat ditentukan dan dilaksanakan, perintah pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan tidak ambigu, karena jika sering berubah-ubah, pelaksana di lapangan bisa menjadi bingung.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber Daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Sumber Daya manusia (staf), sumberdaya manusia merupakan sumber daya utama yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Kurangnya sumberdaya manusia yang memadai atau tidak kompeten dalam profesinya merupakan salah satu penyebab umum kegagalan dalam implementasi kebijakan. Jumlah pegawai atau pelaksana saja tidak cukup. Sebaliknya perlu ada jumlah karyawan yang memadai dengan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk melaksanakan persyaratan kebijakan.
- b) Sarana dan prasarana (fasilitas), fasilitas fisik merupakan komponen penting

dalam pelaksanaan kebijakan bahkan dengan karyawan yang cukup dan pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan, pelaksanaan kebijakan akan gagal tanpa infrastruktur yang diperlukan.

3) Disposisi (*Disposition*)

Unsur penting ketiga dalam strategi implementasi suatu kebijakan publik adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan mampu melakukannya tanpa bias. Hal yang perlu diperhatikan mengenai variabel disposisi adalah apabila pegawai yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan pejabat tinggi, maka pengangkatan birokrat disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan nyata dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu individu yang berkomitmen pada kebijakan yang telah diputuskan lebih khusus untuk kepentingan penduduk harus dipilih dan diangkat untuk posisi pegawai pelaksana kebijakan.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structures*)

Faktor keempat yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan adalah struktur birokrasi. Bahkan ketika sumberdaya tersedia atau ketika pelaksana kebijakan termotivasi dan sadar akan apa yang perlu dilakukan, masih ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan atau direalisasikan karena adanya kekurangan dalam proses implementasi organisasi birokrasi. Ketika struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, sumberdaya akan menjadi tidak efektif dan kemajuan kebijakan akan terhambat karena kebijakan sangat rumit dan bergantung pada kolaborasi banyak individu.

Untuk dapat secara efektif melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik, birokrasi harus dapat mendukungnya.

Penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi struktur birokrasi merupakan dua hal yang dapat meningkatkan kinerja suatu implementasi kebijakan SOP adalah prosedur reguler yang memungkinkan anggota staf untuk melaksanakan tugas sehari-hari mereka sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Fragmentasi di sisi lain adalah pembagian kewajiban kebijakan di antara banyak lembaga yang berbeda, yang membutuhkan koordinasi untuk memastikan bahwa setiap anggota memenuhi tugasnya sesuai dengan SOP.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

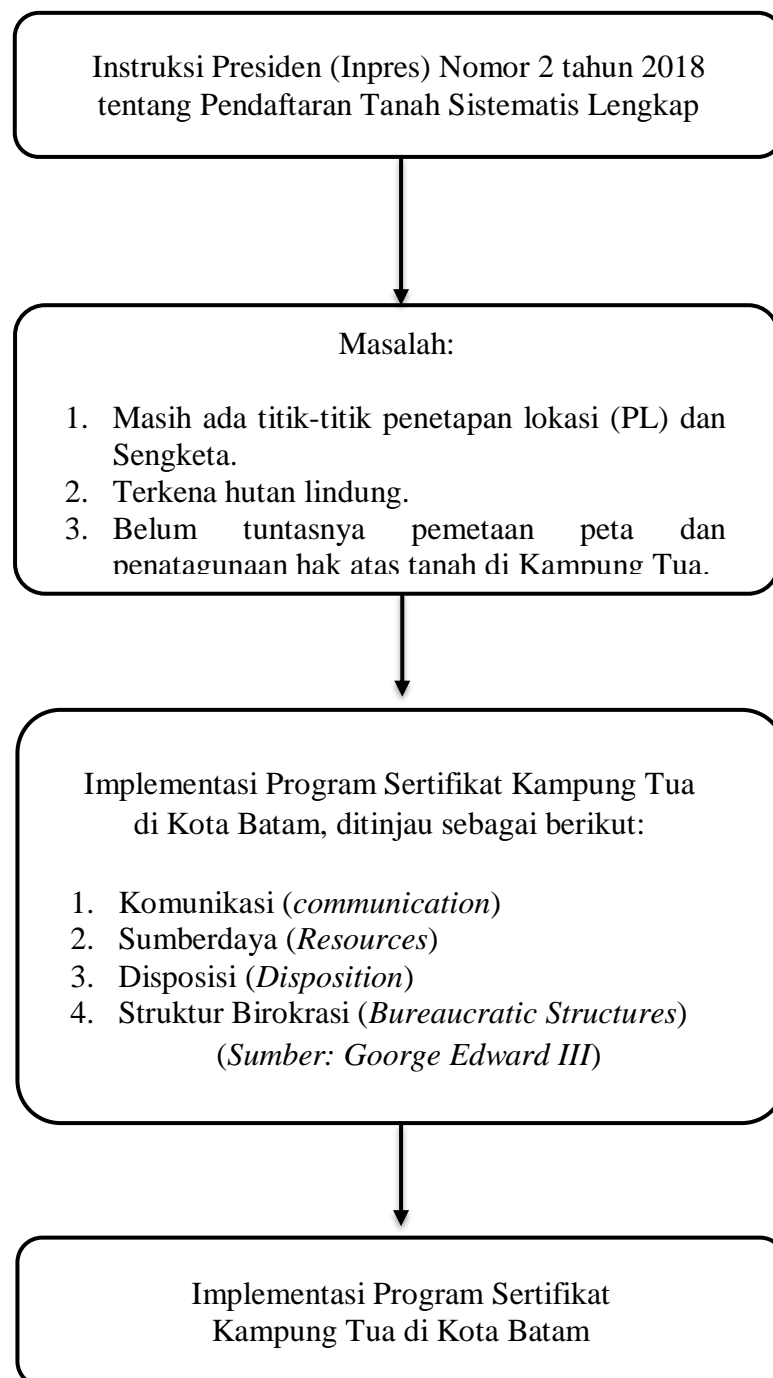
No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Nama Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Kurniawan, 2018) Vol. 4 No. 1 ISSN 2460-8076	Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.	Hasil penelitian yakni implementasi program layanan rakyat untuk sertifikat tanah ini masih kurang efektif dilihat dari jumlah sumber daya manusianya yang kurang, waktu penyelesaian sertifikat tidak tepat waktu yang telah ditentukan.
2.	(Ipul & Prakoso, 2019) E-ISSN: 2615-3394	Implementasi kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan perluasan lokasi bandara Kol. Ra.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah berjalan lancar, pemegang hak atas tanah

		Bessing Malinau	metode penelitian deskriptif kualitatif	bersedia mengikuti prosedur yang ada.
3.	(Tiffani et al., 2020) e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 3	Implementasi program keluarga berencana (KB) dalam upaya menekan pertumbuhan penduduk di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi	Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi program keluarga berencana (KB) dalam upaya menekan pertumbuhan penduduk di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi di temukan bahwa Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang belum sepenuhnya berjalan baik dan efektif.
4.	(Indraningsih, 2019) Volume 1 Nomor 1, Juni 2019 : hal 31-40 E-ISSN : 2685-7170 P-ISSN : 2685-8789	Implementasi Kebijakan pembangunan pariwisata Kota Palu	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitik deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebijakan pariwisata yang akan diterapkan adalah pariwisata berbasis masyarakat. Kurangnya sinergi (komunikasi) antara pemangku kepentingan, kurangnya kompetensi pelaksana kebijakan dan kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga implementasi kebijakan ini belum optimal
5.	(Fitri & Yusran,	Implementasi	Penelitian ini	Hasil penelitian

	2020) (ISSN: 2622-237X) Volume 3 No. 3 2020	Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat	menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat belum optimal dilaksanakan karena masih terkendala dalam beberapa indikator.
6.	(Misbak, 2018) ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398	Implementasi kebijakan program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah bagi nelayan di Kota Cirebon	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.	Hasil penelitian implementasi kebijakan program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah oleh kantor pertanahan Kota Cirebon bagi nelayan Kota Cirebon menemui hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan.
7.	(Warni, Siregar, & Lodan, n.d, 2019)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam (Studi Pada Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sagulung)	Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya efektif tetapi tidak berjalan efisien karena manfaat yang belum merata.
8.	(Suseno, Handoko, Kusbandrijo, & Nasution, 2021) ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972(Online) Vol.11, No.10, 2021	Implementation of Policy for the Use of Village Fund (Study on the Implementation of The Village Funds in Durungbanjar Village, Candi District, Sidoarjo)	This study uses a descriptive qualitative approach.	The results of this study indicate that the implementation of the use of the Village Funds in Durungbanjar Village, Candi District, Sidoarjo Regency has been carried out through

		Regency)		stages that are influenced by leadership factors, community participation, village organizations, and village head examinations.
9	(Eko, Coresponding, & Widodo, 2019) ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972(Online) DOI: 10.7176/PPAR Vol.9, No.6, 2019	Implementasi kebijakan program CSR di Kota Mataram (Study Arranging Implementation Policy Model of CSR in Community Empowerment)	This study uses a descriptive approach	The findings of this study indicate that CSR policy implementation is seen as a potential that can be optimized as an alternative source of development funding, CSR policies have been implemented with reference to the Van Meter and Van Horn public policy models.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran



Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sugiyono (2019:18) Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan postpositivisme untuk mempelajari keadaan suatu objek alamiah (bukan melakukan eksperimen), dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama, metode pengumpulan data bersifat sinkron (gabungan), analisis data bersifat kualitatif/induktif, dan temuan penelitian kualitatif menempatkan penekanan yang lebih besar pada generalisasi. Penelitian ini mencakup suatu kejadian yang terjadi saat melakukan penelitian penelitian kualitatif difokuskan dengan proses melakukan wawancara mendalam dengan partisipan atau narasumber dan mengumpulkan dokumentasi yang luas untuk lebih memahami dan mengartikulasikan suatu masalah.

Pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta tindakan subjek yang diteliti. Peneliti dapat mengidentifikasi subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari melalui penelitian kualitatif. Uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari seseorang, kelompok, komunitas, atau organisasi tertentu dalam pengaturan konteks tertentu yang diteliti dari sudut pandang yang lengkap, menyeluruh, dan holistik seharusnya berasal dari penelitian kualitatif.

3.2 Lokasi dan Jadwal Periode Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Mengembangkan penelitian ini peneliti juga mengikutsertakan lembaga atau instansi yang terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Penentuan lokasi

penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa yang merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan proses program Sertifikasi Kampung Tua di Kota Batam dan mempunyai wewenang dan tugas dalam proses Kota Batam yang berlokasi di JL. Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Harapan, Sekupang, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Serta di titik Kampung tua yang belum mendapatkan sertifikat Kampung Tua di Kota Batam, salah satunya penulis mengambil Lokasi Kampung Tua yang ada di kecamatan Nongsa, karena di kawasan Kecamatan Nongsa adalah kecamatan yang paling banyak kampung tuanya.

2) Jadwal Penelitian

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Kajian Pustaka						
2.	Pengajuan Surat Ijin Penelitian						
3.	Pengumpulan Data						
4.	Pengelolaan dan Analisis Data						
5.	Penyusunan Laporan						
6.	Penyerahan Skripsi						
7.	Sidang						

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, menurut Sugiyono (2019:296) disebutkan bahwa:

1) Data Primer

Memperoleh informasi langsung dari sumber aslinya dikenal sebagai data primer (tidak melalui media perantara). Pendapat individu atau kelompok dapat digunakan sebagai data primer. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara bisa dilakukan dengan pegawai yang ada dikantor BPN dan dengan para petugas program PTSL dikantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam serta dengan masyarakat Kampung Tua dikawasan Kecamatan Nongsa dan pengambilan dokumentasi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh peneliti dari sumber perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder biasanya berupa dokumentasi, dokumen lama atau laporan yang telah disusun menjadi arsip. Serta dari jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu, dari website BPN dan dokumen-dokumen penting dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Batam.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian, metode pengumpulan data adalah fase yang paling penting. Peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan karena tidak diketahui oleh mereka. Secara umum observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan metode yang

digunakan dalam pengumpulan data. Peneliti dalam studi ini secara eksklusif menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

1) Observasi

Semua informasi diperoleh melalui observasi, dan melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan kepentingannya. Taktik ini melibatkan secara langsung melihat atau mengamati orang atau kelompok sasaran, mengevaluasi perilaku mereka dan merekamnya atau mencatatnya.

2) Wawancara

Sebagai bukti bahwa wawancara dengan informan atau sumber data telah dilakukan, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman dan instrumen wawancara yang telah direncanakan sebelumnya antara lain tulisan, perekam atau perekam suara. Penelitian ini menggunakan informan yakni orang-orang yang terkait dengan program PTSL khususnya dikawasan Kampung Tua, data informan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Data Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Bapak Yudo Prio Sasmito, A.Md.	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian
2	Bapak Amir Nugroho, S. ST., M. H	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
3	Bapak Sugianto Tampubolon, S.H., M.H.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
4	Bapak Anwar	RT Kampung Tua Melayu Nongsa
5	Bapak Ridwan	RT Kampung Tua Terih
6	Bapak Benny	Masyarakat Kampung Tua Melayu Nongsa
7	Ibu Fitria	Masyarakat Kampung Tua Terih

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil pengumpulan dan verifikasi data. Jenis pengumpulan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian adalah dokumentasi. Lokasi yang termasuk dalam program pelaksanaan sertifikat Kampung Tua di Kota Batam menjadi bahan studi dokumentasi oleh peneliti. Peneliti menggunakan foto, alat perekam dan pembenaran lainnya untuk memvalidasi pengamatan mereka terhadap fakta dan data untuk dipertanggungjawabkan.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:243) Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan dan mewawancarai subjek untuk memperjelas dan memahami. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis datanya. Teknik analisis data studi ini adalah analisis kualitatif, yang didefinisikan sebagai berikut yang dikemukakan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan dan mengevaluasi data mentah untuk mengubahnya menjadi informasi yang bermakna dan lebih mudah untuk ditafsirkan atau untuk membuat kesimpulan.

2) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, proses umum penyajian data dikenal dengan

istilah penyajian data. Kumpulan data yang telah terstruktur secara logis dan jelas inilah yang membentuk penyajian data..

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, yang merupakan tahap terakhir dari analisis data, dilakukan untuk mengevaluasi hasil reduksi data dengan tetap memperhatikan bagaimana masalah dirumuskan dalam hal hasil yang diinginkan. Untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah saat ini data yang diperoleh dibandingkan dengan satu sama lain.



Universitas Putera Batam